



STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KECAMATAN KUALA JELAI KABUPATEN SUKAMARA BERBASIS *INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT* (ICZM)

INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT STRATEGIES IN KUALA JELAI, SUKAMARA REGENCY

Adha Susanto

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

email: adha.susanto@gmail.com

Abstrak: Sumber daya pesisir dan laut merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian. Namun, sumber daya alam yang sangat potensial tersebut hingga kini belum mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga pemanfaatan dalam pembangunan perekonomian daerah masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan di Kecamatan Kuala Jelai, Sukamara. Metode pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan kuisioner terstruktur yang disusun menggunakan pendekatan *Analytic Hierarchy Process*. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*) dilakukan untuk menentukan strategi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir berbasis *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) harus dilakukan berdasarkan pengelolaan bersama oleh seluruh stakeholder yang ada. Strategi yang dapat dilaksanakan yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang, dan mengoptimalkan kolaborasi dan komunikasi terhadap kebijakan daerah dan desa untuk saling mendukung dalam mengelola wilayah pesisir.

Kata Kunci: *Analytic hierarchy process, ICZM, kebijakan daerah, pengelolaan bersama*

Abstract: *Marine and coastal resources are two environmental elements that are potential to help improving local economy. However, these resources have not been used optimally by communities and hence hinder their ideal contribution to regional development. This research aims to find integrated and sustainable coastal area management strategies at Kuala Jelai sub-district in Sukamara Regency. Methods of collecting data and information were done by doing interview via structured questionnaire which was developed using Analytic Hierarchy Process approach. SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) was employed to determine the best strategy in coastal and marine resource management. Results of this research show that managing coastal area based on Integrated Coastal Zone Management (ICZM) must involve cooperation from all stakeholders. Best strategies that must be adopted including: improving human resource capacity, improving infrastructure, and optimizing collaboration and communication of local policies down to the village level to ensure co-management in Kuala Jelai.*

Keywords: *Analytic hierarchy process, co-management, ICZM, local policy*

I. PENDAHULUAN

Sumberdaya pesisir dan laut merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut berada wilayah pesisir Kecamatan Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. Keindahan pantai, perikanan budidaya air payau dan perikanan tangkap sebanyak 1904,02 ton dan 215,87 ton di wilayah administrasi daerah seluas 796 km² mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikelola dengan optimal dan bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah (BPS Sukamara, 2018).

Pada umumnya kendala yang dihadapi dalam optimalisasi potensi sumber daya pesisir dan laut adalah rendahnya sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu strategi pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu langkah penting untuk direncanakan dan dilaksanakan dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah pesisir (Citra, 2017). Masyarakat pesisir mempunyai peran dan posisi sangat sentral sudah seharusnya lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mengingat selama ini masyarakat pesisir mempunyai sikap cenderung lebih pasif (Tinambunan, 2016).

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian tentunya harus didukung oleh beberapa komponen

utama dalam pembangunan wilayah pesisir yakni masyarakat lokal, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya. Kualitas SDM yang menjadi bagian dalam skala prioritas dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut juga harus diimbangi peran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang merupakan pemangku kebijakan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan dan menunjang pemanfaatan subsektor perikanan dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Reressy *et al.*, 2016). Menurut Luca (2016) kegiatan pembangunan daerah (kabupaten atau provinsi) sangat diperlukan peran dari pemerintah pusat. Peran dari pemerintah pusat dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

- a. memberikan insentif kepada pemerintah daerah dalam menstimulasi investasi pada suatu wilayah;
- b. menetapkan kebijakan yang dapat menahan investasi publik untuk pengembangan infrastruktur sosial yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah;
- c. melakukan penggerakan suatu mekanisme administrasi dan legislative yang berguna untuk perkembangan bisnis ke arah yang lebih baik. Menentukan skala prioritas suatu kawasan, ketersediaan infrastruktur yang mendukung dalam menumbuhkan potensi sumber daya wilayah merupakan teknik perencanaan pengembangan kawasan pesisir terpadu dan berkelanjutan (Ekosafitri *et al.*, 2017).

Integrated Coastal Zone Management (ICZM) merupakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dengan memperhatikan seluruh sektor yang terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dikenal dengan pengelolaan berdasarkan pendekatan secara komprehensif berupa kebijakan dari kewenangan lembaga dan hukum yang diperlukan dalam pembangunan dan perencanaan suatu kawasan pesisir dan laut (Kristiyanti, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Kuala Jelai, Sukamara berbasis *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM). Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan mampu memberikan

arahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan.

II. METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pusat pemerintahan Kecamatan Kuala Jelai diantara 02°93'675" Lintang Selatan dan 110°87'463" Bujur Timur. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Januari – Februari 2019.

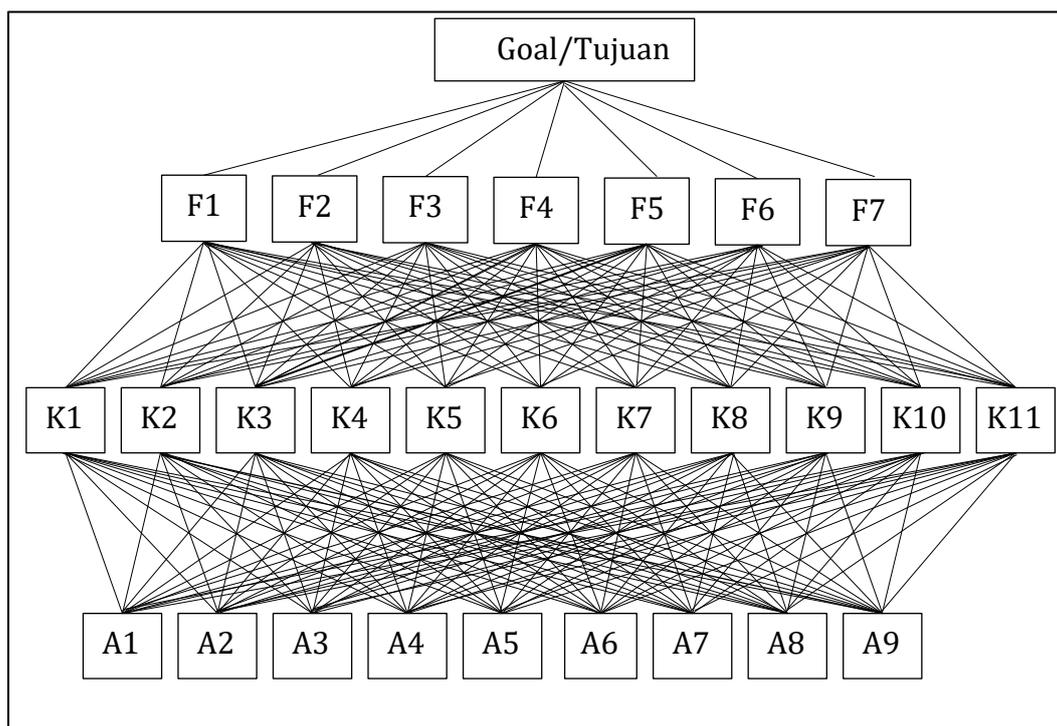
Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap masyarakat melalui kuisisioner, pengamatan melalui *survey* lapangan dan dokumentasi menyangkut objek yang diteliti sesuai kebutuhan. Kuisisioner dilakukan untuk mendapatkan persepsi dari *stakeholder* terhadap pengelolaan wilayah pesisir Kuala Jelai. Menurut Widiastuti *et al.* (2018) responden yang digunakan pada penelitian harus mengacu pada homogenitas pekerjaan masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 78 responden. Data sekunder diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuala Jelai dan studi literatur yang relevan sesuai kebutuhan dalam penelitian ini.

Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data yang didapatkan dari berbagai sumber, pengamatan dilapangan, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara berupa kuisisioner yang dikembangkan berdasarkan Analysis Hierarchy Process (AHP). Susunan hirarki AHP yang dirumuskan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Dengan penjelasan komponen-komponennya pada Tabel 1.

Analisis berdasarkan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dilakukan menggunakan aplikasi Super Decision 2.8 yang dapat diperoleh pada <https://www.superdecisions.com/downloads/>. Analisa AHP ini berfungsi untuk menganalisa persepsi *stakeholder* dalam menentukan skala prioritas pengambilan keputusan mengenai strategi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Setelah melakukan analisa penentuan skala prioritas, selanjutnya dilakukan penyusunan strategi berdasarkan analisis SWOT.



Gambar 1. Hirarki AHP pada Penelitian

Tabel 1. Keterangan Gambar 1.

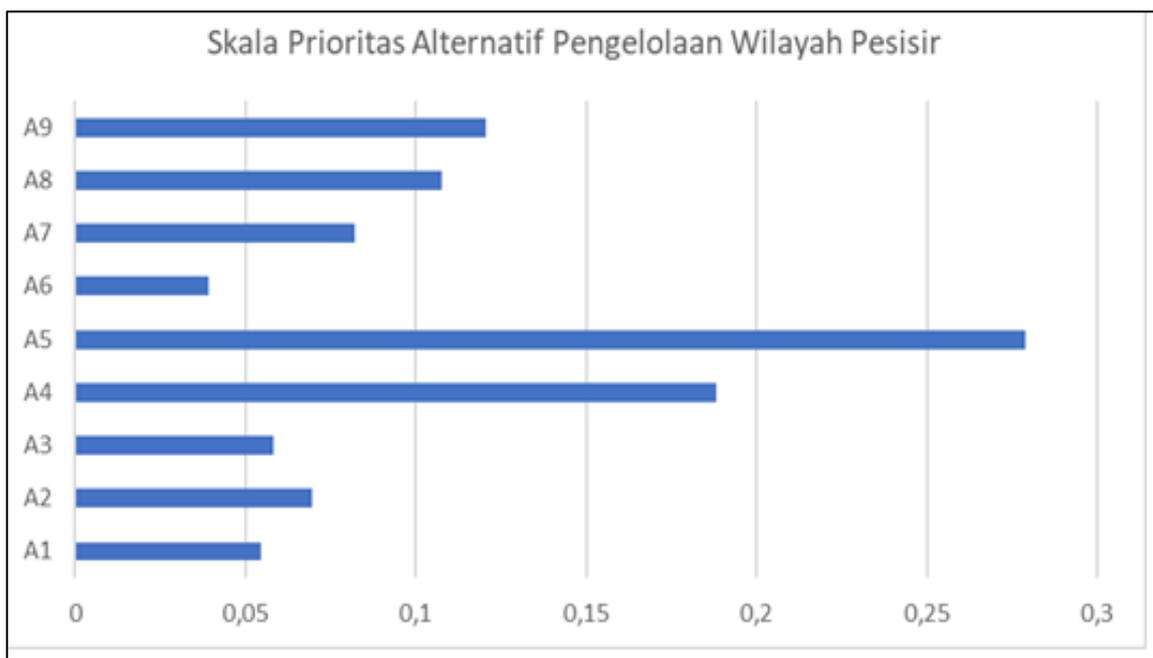
Tujuan	Uraian
Tujuan	Menentukan model pengelolaan wilayah pesisir berbasis Integrated Coastal Zone Management (ICZM)
Faktor	Uraian
F1	Kebijakan nasional
F2	Kebijakan daerah
F3	Sumber daya manusia
F4	Teknologi
F5	Akses keuangan
F6	Industrialisasi
F7	Persepsi masyarakat
Kriteria	Uraian
K1	Regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir
K2	Peraturan dan kebijakan terkait yang ada sebelumnya
K3	Dukungan instansi pemerintah daerah terkait
K4	Ketersediaan teknologi dan infrastruktur
K5	Penerapan konsep sumber daya laut berkelanjutan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut
K6	Ketersediaan modal aktivitas pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut
K7	Akses pangsa pasar produk perikanan
K8	Peningkatan produksi perikanan
K9	Kelestarian lingkungan
K10	Penerapan penangkapan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir berwawasan ekosistem

Alternatif	Uraian
A1	Penyusunan Perda dalam mendukung perekonomian pesisir dan pelestarian ekosistem
A2	Sosialisai penerapan pemanfaatan sumber daya berbasis ekosistem kepada masyarakat
A3	Sosialisasi teknis penerapan pengelolaan wilayah pesisir dari pusat kepada pemda
A4	Meningkatkan saran dan prasarana
A5	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
A6	Menyediakan akses rantai pasok produk perikanan
A7	Menyediakan akses permodalan pengelolaan wilayah pesisir dan produk perikanan
A8	Menyediakan akses pangsa pasar produk perikanan dan sumber daya pesisir lainnya
A9	Mengembangkan wawasan masyarakat pesisir terhadap pentingnya keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut

III. HASIL

Alternatif pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat berdasarkan analisa skala prioritas adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan teknis dan meningkatkan pembangunan

infrastruktur penunjang. Hasil analisis tersebut dapat terlihat berdasarkan nilai skoring terhadap penentuan skala prioritas yakni pada A5 0.27906 dan A4 0.18832. Hasil analisis skoring tersebut dapat terlihat gambar 1 dibawah ini



Gambar 2. Skala Prioritas Alternatif Pengelolaan Wilayah Pesisir

Sumber: Modifikasi dari *Analytic Hierarchy Process* menggunakan aplikasi *Super Decision 2.8*

Analisa SWOT yang dilakukan dalam menganalisis strategi pengelolaan pesisir berbasis masyarakat berdasarkan hasil skoring persepsi *stakeholder*:

Hasil pembobotan dan skoring yang dilakukan setelah wawancara dan observasi dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah:

Tabel 2. Faktor Internal dan Ektsternal

<i>Kekuatan (Strength)</i>				
No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
1	Potensi ekologi pesisir masih asri dan mempunyai daya tarik wisata	0,22	3,8	0,85
2	Kebijakan pemerintah	0,22	3	0,66
3	Ketersediaan SDM wilayah pesisir besar	0,2	2,8	0,56
	Jumlah	0,64		2,07
<i>Kelemahan (Weakness)</i>				
No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
1	Minimnya pembinaan, Pendidikan dan pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	0,17	2,7	0,45
2	Minimnya infrastruktur penunjang	0,09	2,5	0,22
3	Minimnya tenaga penyuluh kelautan yang kompeten	0,1	2	0,2
	Jumlah	0,36		0,87
	Total Kekuatan dan Kelemahan	1		2,94
<i>Peluang (Opportunities)</i>				
No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
1	Adanya kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pengembangan wilayah pesisir	0,18	3	0,53
2	Pemerintah desa mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut	0,18	2,8	0,51
3	Kebijakan nasional terhadap pengembangan bisnis kelautan dan perikanan	0,18	3	0,53
	Jumlah	0,54		1,57
<i>Ancaman (Threats)</i>				
No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
1	Sosial budaya masyarakat pesisir	0,08	1	0,08
2	Minimnya koordinasi antar stakeholder dan anggaran pengelolaan wilayah pesisir di pemerintah daerah	0,19	2	0,38
3	Menurunnya daya dukung lingkungan pesisir akibat aktivitas masyarakat pesisir	0,19	1,5	0,28
	Jumlah	0,46		0,74
	Total peluang dan ancaman	1		2,31

Tabel 3. Tabel 3. Matriks Alternatif Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir

No.	Alternatif Strategi	Nilai	Total Skor	Ranking
1	SO (Kekuatan-Peluang)	2,07 + 1,57	3,64	1
2	ST (Kekuatan-Ancaman)	2,07 + 0,74	2,81	2
3	WO (Kelemahan-Peluang)	0,87 + 1,57	2,44	3
4	WT (Kelemahan-Ancaman)	0,87 + 0,74	1,61	4

Tabel 4. Matrik SWOT Pengelolaan Wilayah Pesisir

Internal	Kekuatan (Strengths/S)	Kelemahan (Weaknesses/W)
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi ekologi pesisir masih asri dan mempunyai daya tarik wisata - Kebijakan pemerintah - Ketersediaan SDM wilayah pesisir besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pembinaan, Pendidikan dan pelatihan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut - Minimnya infrastruktur penunjang - Minimnya tenaga penyuluh kelautan yang kompeten
Peluang (Opportunities/O)	Strategi S-O	Strategi S-T
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesiapan Pemda untuk melaksanakan program pengembangan wilayah pesisir - Pemerintah desa mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut - Kebijakan nasional terhadap pengembangan bisnis kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan SDA berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki daerah dalam melihat peluang - Melakukan kolaborasi dan komunikasi terhadap kebijakan daerah dan desa untuk saling mendukung terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut - Meningkatkan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan bisnis kelautan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan dan mengembangkan metode pembinaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir - Meningkatkan sistem koordinasi antara pemerintah desa, daerah dan provinsi dalam menyediakan kebutuhan infrastruktur penunjang pengelolaan wilayah pesisir - Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh kelautan dan perikanan
Ancaman (Threats/T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> - Sosial budaya masyarakat pesisir - Minimnya koordinasi antar <i>stakeholder</i> dan anggaran pengelolaan wilayah pesisir di pemerintah daerah - Menurunnya daya dukung lingkungan pesisir akibat aktivitas masyarakat pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan - Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menjalankan program yang ada untuk membangun kualitas SDM - Memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga ekologi pesisir yang lestari 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat pesisir pentingnya pengelolaan wilayah pesisir untuk kesejahteraan bersama - Meningkatkan pembangunan infrastruktur vital berdasarkan RZWP3K daerah - Mengoptimalkan peran penyuluh kelautan dan perikanan terhadap pembentukan kualitas SDM masyarakat pesisir

IV. PEMBAHASAN

Analisa Persepsi Stakeholder

Hasil analisis persepsi dari *stakeholder* terhadap penentuan skala prioritas pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Kuala Jelai terdapat dua skala prioritas yakni meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan teknis dan meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang. Penelitian Kurniasari *et al.* (2014) meningkatkan kualitas SDM

dengan memberikan kegiatan pelatihan terhadap pengelolaan pesisir merupakan arah kebijakan yang menjadi prioritas dalam mengelola dan mengembangkan kawasan pesisir. Persepsi *stakeholder* menetapkan kriteria utama dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni mendorong pengembangan infrastruktur sebagai kriteria utama guna menunjang kegiatan pengembangan wilayah pesisir dengan mempertimbangkan aspek

sosial ekonomi, lingkungan dan kelembagaan (Ekosafitri *et al.*, 2017).

Meningkatkan kualitas SDM pesisir dalam hal menjaga dan mengelola sumber daya pesisir dan laut tentunya harus memiliki tujuan utama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya tenaga-tenaga ahli yang turun langsung ke daerah pesisir Kecamatan Kuala Jelai untuk memberikan pelatihan melalui program-program yang mendukung pengelolaan pesisir secara terpadu. Upaya yang dapat dilakukan dalam merealisasikan program-program pengelolaan wilayah pesisir harus didukung dengan terbentuknya kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* (Kurniasari *et al.*, 2014).

Hasil analisis matriks SWOT pada tabel 2 terhadap pemilihan strategi yang diperoleh dari hasil evaluasi faktor internal dan eksternal diketahui bahwa nilai skor 3,64 merupakan skor tertinggi yakni mengoptimalkan strategi kekuatan dan peluang. Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Kuala Jelai dapat mengoptimalkan alternatif strategi dan peluang. Alternatif strategi yang digunakan dapat disusun rumusan program kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan SDA berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki daerah dalam melihat peluang. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
 - a. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk menunjang pengelolaan dan pengolahan sumber daya pesisir dan laut
 - b. Melakukan pelatihan teknis terhadap sekelompok masyarakat melalui kegiatan magang atau studi banding ke daerah pengembangan sektor pesisir terintegrasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
2. Melakukan kolaborasi dan komunikasi terhadap kebijakan daerah dan desa untuk saling mendukung terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:
 - a. Menyusun peraturan-peraturan desa dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
 - b. Meningkatkan hubungan kemitraan desa kepada institusi pendidikan dan pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi sinergi

untuk mendukung program pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

3. Meningkatkan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan bisnis kelautan ramah lingkungan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
 - a. Memperluas jaringan pemasaran produk dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan kewirausahaan pada usaha kecil dan menengah untuk kompetitif.
 - b. Membangun sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kegiatan bisnis kelautan seperti perbaikan jalan antar desa dan daerah, kualitas jaringan internet, dan kemitraan terhadap pelaku bisnis.

Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (ICZM)

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Kecamatan Kuala Jelai harus dilakukan berdasarkan konsep *co-management* yang melibatkan unsur-unsur dari tingkatan pemerintahan dan masyarakat lokal (*community based development*). Konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* tersajikan pada Gambar 2.

Gambar tersebut menjelaskan bahwa beberapa strategi dan kebijakan dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut dengan metode harus berdasarkan kepada:

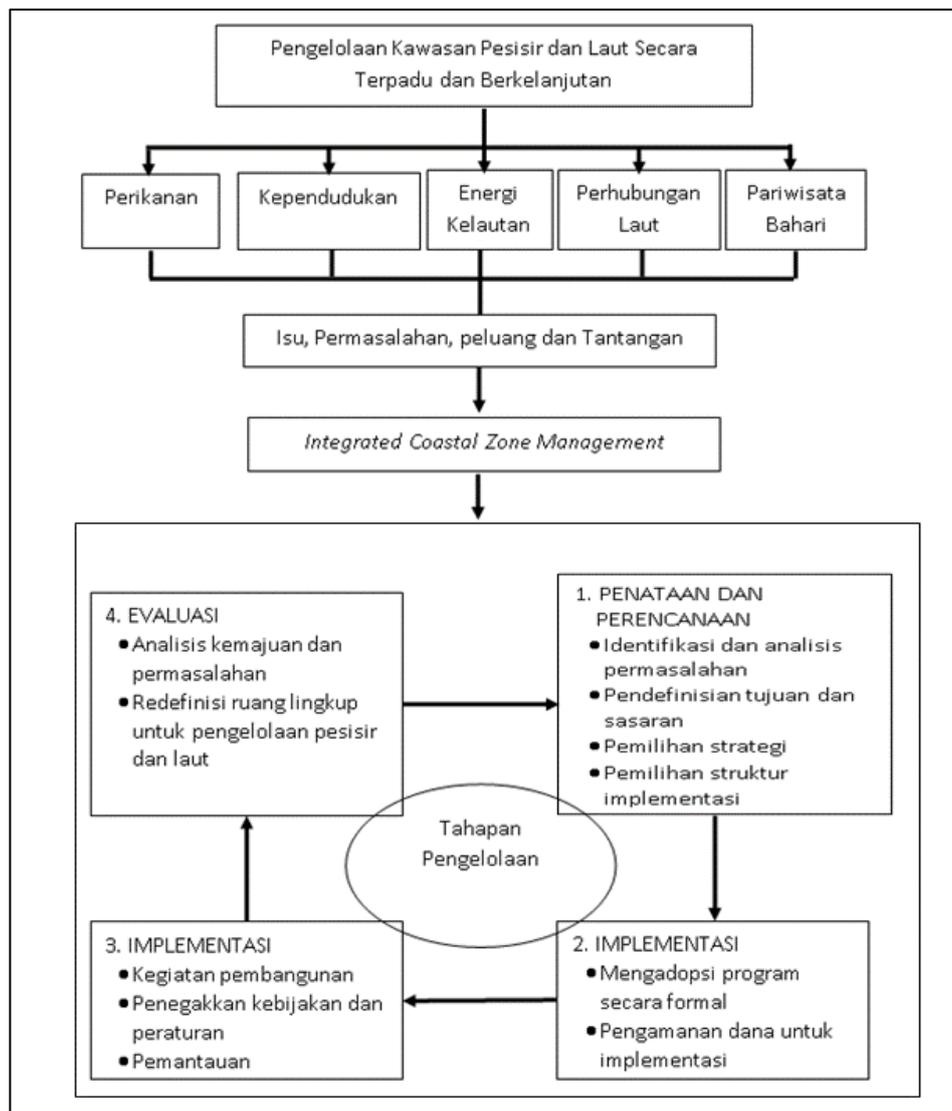
- i. proses dan sifat alamiah wilayah pesisir yang akan dikelola harus dipahami,
- ii. kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik,
- iii. memahami kebutuhan saat ini dan akan datang (Rahmawati, 2004).

Berdasarkan ketiga hal tersebut maka pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Kuala Jelai dapat dilakukan dengan mengimplementasikan tiga strategi utama dari dua belas strategi pengelolaan. Upaya mengimplementasikan strategi pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan metode *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan. Masyarakat lokal merupakan komponen yang harus berperan dalam titik sentral dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara terintegrasi. Memberikan keluasaan untuk berperan aktif dan memberdayakan masyarakat secara lebih luas

untuk keterlibatannya pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir tentunya akan memberikan keuntungan besar. Menurut Kristiyanti (2016) keuntungan yang didapat dalam menempatkan masyarakat sebagai titik sentral dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, yakni masyarakat terlibat dalam mengontrol sumber daya di sekitarnya, dukungan yang luas dalam pengelolaan sumber daya

alam yang ada, tersedianya data yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, dan pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat disekitarnya. Masyarakat yang dilibatkan secara langsung tentunya harus diimbangi dengan tetap terus menerus berkomunikasi secara terbuka dalam menjalin hubungan baik antar *stakeholder* lainnya untuk mencapai tujuan.



Gambar 3. Metode *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM)
 Sumber: Rahmawati (2004)

Kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir yang bertujuan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut tentu harus didukung dengan keberadaan infrastruktur. Infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan wilayah pesisir di Kecamatan Kuala Jelai adalah pabrik es, *cold storage*, dan lain-lain

yang menunjang pengolahan ikan serta pasar. Optimalisasi fungsi dan perawatan dari beberapa fasilitas yang sudah tersedia seperti pelabuhan, dermaga, dan tempat pelelangan ikan (TPI) harus dilakukan sebagai fasilitas untuk melakukan bisnis kelautan dan perikanan. Ketersediaan infrastruktur memadai tentunya akan memberikan peluang usaha dibidang kelautan dan perikanan bagi

masyarakat lokal dan investor luar daerah (Razak *et al.*, 2017).

Pengembangan wilayah pesisir juga sangat dibutuhkan keberadaan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana dalam mengembangkan wilayah pesisir khususnya dalam sektor penunjang pariwisata bahari di Kecamatan Kuala Jelai yang mempunyai potensi besar harus dilakukan serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan. Menurut Ekosafitri *et al.* (2017) pengembangan sarana prasarana pesisir terutama dalam hal sektor pariwisata bahari menjadi prioritas untuk dilakukan dalam mendorong kegiatan di wilayah pesisir. Pariwisata bahari di Kecamatan Kuala Jelai khususnya di Desa Sungai Raja merupakan salah satu kawasan pesisir yang berkembang dalam sektor jasa ekosistem dan untuk menikmati ekosistem pesisir tersebut diperlukan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung dalam menunjang sektor pariwisata bahari berupa *home stay*, rumah makan, tempat camp/berkemah, dan taman bermain. Pengelolaan dalam sektor pariwisata bahari tersebut tentunya dapat terwujud apabila dilakukan pengelolaan dengan optimal antar stakeholder dan memperhatikan kelestarian lingkungan agar pengelolaan pesisir berlangsung secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Kurniasari *et al.*, 2014).

Ketiga, melakukan kolaborasi dan komunikasi terhadap kebijakan daerah dan desa untuk saling mendukung dalam mengembangkan wilayah pesisir di Kecamatan Kuala Jelai. Kolaborasi dan komunikasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan dengan membuat kebijakan hukum secara jelas dan tidak tumpang tindih. Kebijakan dan strategi untuk menata pengelolaan wilayah pesisir dan laut dihasilkan melalui proses negosiasi bersama antar *stakeholder*. Proses negosiasi tentunya harus dilaksanakan dengan memadukan pemahaman dan keterpaduan untuk menciptakan suatu bentuk tata kelola pembangunan wilayah pesisir dan kelautan secara sistemik, adanya tujuan dan sasaran, memperhatikan nilai dan etika pembangunan yang berwawasan kelestarian lingkungan, dan penyelesaian sengketa dan kerjasama diantara masyarakat pesisir, pemerintah *stakeholder* (Sunyowati, 2008).

Kebijakan pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir di Kecamatan Kuala Jelai harus dilakukan berdasarkan keterpaduan antar sektor, tingkatan pemerintahan, pengelolaan dan ilmu pengetahuan, dan ruang. Hal tersebut didasarkan bahwa sifat alamiah wilayah pesisir dan masyarakatnya yang sangat dinamis dan kompleks, maka pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan pendekatan secara terpadu, rasional, dan optimal

yang mengedepankan peran aktif dari masyarakat pesisir (Hiariey, 2013).

V. KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* di Kecamatan Kuala Jelai harus dilakukan dengan *co-management* yang melibatkan unsur-unsur tingkatan pemerintah (*government based management*), masyarakat lokal (*community based development*) dan antar *stakeholder* lainnya. Upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut tersebut dapat di implementasikan dengan strategi pengelolaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dan laut
3. Melakukan kolaborasi dan komunikasi terhadap kebijakan daerah dan desa untuk saling mendukung dalam mengembangkan wilayah pesisir di Kecamatan Kuala Jelai

VI. REKOMENDASI DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mengembangkan dan membangun wilayah pesisir untuk mensejahterakan masyarakat dapat dimulai dengan melakukan program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan. Program yang dapat dilakukan diantaranya mengenalkan sistem budidaya perikanan terapung berbasis teknologi dan pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan bisnis di sektor perikanan.
- 2) Bagi masyarakat Kecamatan Kuala Jelai dapat mengikuti secara lebih aktif dan berperan lebih dalam mengelola sumber daya pesisir dan kelautan berkelanjutan dengan memberikan saran kepada pemerintah daerah dan desa, serta stakeholder lainnya dalam merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan penelitian selanjutnya yakni dapat dilakukan Analisa valuasi ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) yang bertujuan untuk mencari strategi pengelolaan yang efektif dan ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Sukamara. 2018. Kecamatan Jelai Dalam Angka 2018. Sukamara: Diakses dari <https://sukamarakab.bps.go.id/>.
- Citra, I. P. A. 2017. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 31. doi: 10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484.
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E. and Yulianda, F. 2017. Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. Institut Pertanian Bogor. 1(2), 145. doi: 10.29244/jp2wd.2017.1.2.145-157.
- Hiariey, L. S. 2013. Peran Serta Masyarakat Pemanfaatan Pesisir Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi*. 14 (1), 46-61.
- Kristiyanti, M. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management)', Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu, (180), 752-760. Available at: http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/4264/1270.
- Luca, D. 2016. Votes and Regional Economic Growth: Evidence from Turkey', *World Development*. Elsevier Ltd, 78, 477-495. doi:v10.1016/j.worlddev.2015.10.033.
- Kurniasari, R., Bakti, D. and Leidonald, R. 2014. Analisis Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu Di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatra Utara. *Manajemen Sumberdaya Perairan*, Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara. (1).
- Rahmawati. 2004. *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Medan: e-USU Repisotory.
- Razak, F., B. O. L. Suzana, dan G. H. M. Kapantow. 2017. Strategi Pengembangan Wisata Pantai Malayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. *Agri-SosiaEkonomi Unsrat*. 13 (1A), 277-284.
- Sunyowati, D. 2008. Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management. *Mimbar Hukum*. 20(3), 425-442. doi: 10.20303/jmh.v20i3.246.
- Tinambunan, H. S. R. 2016. Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi. *Mimbar Hukum*, 28(FH UGM). 250-262.